

**ANALYSIS OF INDEPENDENCE, EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY IN
REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE
(CASE STUDY ONLY JAMBI PROVINCIAL GOVERNMENT 2019-2023,
NOT REGENCY/CITY)**

**ANALISIS KEMANDIRIAN, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PADA
KINERJA KEUANGAN DAERAH
(STUDI KASUS HANYA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2019-2023 BUKAN PADA KABUPATEN/KOTA)**

Putri Rizki¹⁾*

Misni Erwati²⁾

¹⁾Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

²⁾Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

^{*)} Korespondensi

Email : rizkiputri2006@gmail.com¹⁾, misni_ervati@unja.ac.id²⁾

ABSTRACT

Regional financial performance is the level of achievement of a work result in the field of regional finance using predetermined financial indicators with the aim of determining a region's ability to manage its finances. based on the budget and realization of local original income using financial indicators determined through a policy or statutory provisions during one budget year. The form of performance measurement is in the form of financial ratios. The aim of this research is to determine and analyze the influence of efficiency, effectiveness and partial efficiency on the regional financial performance of Jambi Province. The approach used in this research is a qualitative approach using descriptive analysis. The research results show that the regional financial independence ratio is in the medium category, the effectiveness ratio is in the effective category and the efficiency ratio is in the inefficient category. It is hoped to improve regional financial performance and especially the level of efficiency for work programs in order to minimize the funds spent.

Keywords: independence, effectiveness, efficiency, regional financial performance

ABSTRAK

Kinerja keuangan daerah yaitu tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. berdasarkan anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu tahun anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemandirian, efektivitas dan efisiensi secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Jambi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keangan daerah berada pada kategori sedang, pada rasio efektivitas berada pada kategori efektif dan pada rasio efisiensi pada kategori tidak efisien. Diharapkan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerahnya dan terutama pada tingkatan efisiensi untuk program kerja agar meminimkan dana yang dikeluarkan.

Kata Kunci: kemandirian, efektivitas, efisiensi, kinerja keuangan daerah

1. PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian daerah dengan memanfaatkan semua potensi dan sumber daya yang tersedia sejatinya dilakukan untuk dapat sampai ke tahapan perekonomian selanjutnya dimana salah satu ciri utamanya adalah pengelolaan yang serasi dan seimbang di antara satu sektor dan sektor lainnya guna memberi kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah tersebut guna meningkatkan kemandirian serta kemampuan daerah untuk dapat lebih memberi kontribusi dalam perekonomian nasional dan mencapai demokrasi ekonomi (Liow dkk., 2019).

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mencatat, mengukur, menilai, dan mencapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Jika kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan baik dan benar maka semakin baik pengelolaan keuangan baik dalam hal pengelolaan belanja modal yang dilakukan oleh daerah tersebut. Untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan belanja modal dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, melakukan analisis rasio keuangan pada APBD dapat bertujuan untuk membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode yang dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dapat diketahui kecenderungan yang terjadi pada suatu daerah. Kinerja keuangan tersebut biasanya dinyatakan dengan rasio keuangan yang diidentifikasi dari laporan keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2019).

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2013).

Indikator kemandirian keuangan suatu daerah adalah rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan dan pinjaman, dengan demikian PAD dan Dana Perimbangan merupakan sumber pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah suatu daerah. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik (Halim, 2013). Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat (Mahmudi, 2019).

Jambi adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur, di bagian tengah pulau Sumatra, ibu kotanya berada di kota Jambi. Provinsi dengan luas wilayah 50.160,05 km². Dengan berbagai macam pendapatan daerah yang dihasilkan dimulai dari sektor perkebunan dan pertanian hingga sektor pariwisata yang ada didaerah Provinsi Jambi.

Tabel 1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Periode Tahun 2019-2023 (dalam Miliar Rupiah)

No	Tahun	PAD(Pendapatan Asli Daerah)		Belanja Daerah	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2019	Rp1.524.640.000	Rp1.651.090.000	Rp4.813.410.000	Rp4.824.370.000
2	2020	Rp1.665.330.000	Rp1.535.180.000	Rp5.244.840.000	Rp4.430.390.000
3	2021	Rp1.507.200.000	Rp1.843.430.000	Rp4.516.150.000	Rp4.388.300.000
4	2022	Rp1.780.660.000	Rp2.163.590.000	Rp4.795.850.000	Rp4.755.420.000
5	2023	Rp2.259.690.000	Rp1.900.660.000	Rp5.501.680.000	Rp4.962.920.000

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Portal Data APBD Provinsi Jambi Periode 2019-2023

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas, ditinjau bahwa PAD Provinsi Jambi tahun 2019 dari realisasi dikurangi oleh anggaran mendapatkan hasil Rp126.450.000 (8,29 % melebihi yang dianggarkan) dengan belanja daerah Rp10.960.000 (0,23 % berlebih dari yang dianggarkan terhadap belanja yang direalisasikan).

Pada tahun 2020 realisasi PAD tidak sesuai dengan yang telah dianggarkan -Rp130.150.000 (-7,81 %) dengan belanja daerah mengalami pengurangan dari yang dianggarkan senilai -Rp814.450.000 (-15,53 %). Untuk tahun 2021 realisasi PAD melebihi dari target yang dianggarkan yaitu senilai Rp336.230.000 (22,31 %) dengan belanja daerah mengalami pengurangan dari yang dianggarkan senilai -Rp127.850.000 (-2,83 %). Dan pada tahun 2022 realisasi PAD melebihi yang ditargetkan yaitu Rp382.930.000 (21,51 %) dengan belanja daerah mengalami pengurangan dari yang dianggarkan senilai -Rp40.430.000 (-0,84 %). Serta pada tahun 2023 realisasi PAD tidak sesuai dengan yang telah dianggarkan -Rp359.030.000 (-15,89 %) dengan belanja daerah mengalami pengurangan dari yang dianggarkan senilai -Rp538.760.000 (-9,79 %).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dirujuk karena beberapa hal. Berdasarkan saran dari peneliti terdahulu yang mengharapkan peneliti dimasa sekarang/mendatang untuk mengaplikasikan indikasi dalam kinerja keuangan daerah yang tidak semua komponennya dimasukkan. Hanya rasio kemandirian,efisiensi dan efektivitas saja yang dimasukkan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. dengan cara dianalisis.

Terkait perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang lain yaitu pada penelitian ini menambahkan variasi variabel bebas (variabel independen) yang tidak dimuat oleh penelitian-penelitian manapun. Untuk pembaharuan dari penelitian ini (*novelty*)nya yaitu pada penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti berjudul Analisis Kemampuan Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dikabupaten Muaro Jambi (Villya Marsheela Putri, 2024). Sedangkan penelitian ini tentang Analisis Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi pada Kinerja Keuangan Daerah.

Alasan mengapa peneliti memilih pada daerah Provinsi Jambi karena anggaran belanja daerah dengan pendapatan daerah Jambi yang didanai oleh pemerintah pusat belum sepenuhnya mampu berjalan dengan baik dan dana yang digunakan di daerah masih bergantung dari dana pemerintah pusat. Maka diperlukan menganalisis kemandirian, efektivitas serta efisiensinya serta tingkat ketergantungan pemerintah daerah Provinsi Jambi terhadap dana dari Pemerintah Pusat. Sehingga ke depannya menjadi koreksi bersama antara pemerintah dan masyarakat agar bisa secara mandiri memenuhi kebutuhan rumah tangga daerahnya sendiri. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Analisis Kemandirian, Efektivitas Dan Efisiensi Pada Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 - 2023".

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Rasio Kemandirian keuangan daerah

Menurut (Mahmudi, 2019) menjelaskan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan sejauh mana suatu daerah bergantung pada pendapatan transfer atau sumber data *eksternal*. Semakin besar persentase kemandirian keuangan daerah, maka semakin rendah pula ketergantungan daerah terhadap bantuan luar, begitu pula sebaliknya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah juga digambarkan dengan persentase kemandirian keuangan daerah. Semakin besar partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula rasio kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemandirian keuangan suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian. Rasio kemandirian menggambarkan derajat kemandirian suatu daerah atau mengukur seberapa besar penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah. Rumus dalam menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

2.2. Rasio Efektivitas PAD

Menurut (Mahmudi, 2019) menjelaskan rasio efektivitas PAD membandingkan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai PAD yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil yang rendah. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus dalam menghitung rasio ini yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

2.3. Rasio Efisiensi PAD

Menurut (Mahmudi, 2019) menjelaskan rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 %. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.4. Kinerja Keuangan daerah

Menurut (Mahsun, 2019) mengatakan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah Pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Menurut (Mahmudi, 2019) terdapat beberapa analisis rasio didalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:

a. Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

b. Rasio kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah (*otonomi fiskal*) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah. Rasio kemandirian dihitung dengan cara perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi \& Pinjaman}}$$

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat ditampilkan dalam Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Tabel 2
Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: (Halim, 2013)

- c. Rasio efektivitas
Menurut (Mahsun, 2019), rasio efektivitas diukur dengan:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{PAD}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}}$$

Tabel 3
Efektivitas keuangan daerah

Efektivitas keuangan daerah	Rasio Efektivitas (%)
Tidak Efektif	$X < 100\%$
Efektif Berimbang	$X = 100\%$
Efektif	$X > 100\%$

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}}$$

Tabel 4
Efisiensi Kinerja Keuangan

Efektivitas keuangan daerah	Rasio Efektivitas (%)
Tidak Efisien	$X > 100\%$
Efisien Berimbang	$X = 100\%$
Efisien	$X < 100\%$

Sumber: (Mahsun, 2019)

- d. Rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung
Menurut (Mahmudi, 2019) analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas). Sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi *output* kegiatan.

Secara sederhana, rasio tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

- e. Rasio pertumbuhan
Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_n - 1}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pendapatan } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_n - 1}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Belanja } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi Penerimaan Belanja } X_n - 1}$$

2.5. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka peneliti mengajukan 3 hipotesis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- H1** : Kemandirian berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Jambi.
- H2** : Efektivitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Jambi.
- H3** : Efisiensi berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Jambi.

3. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu pada studi kasus terhadap kemandirian, efektivitas dan efisiensi pada kinerja keuangan daerah. Setelah itu , penelitian ini menerapkan metode deskriptif dalam upaya menyimpulkan serta menganalisis hasil penelitian yang diperoleh. Jenis data pada penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif. Selain itu, data yang dipakai pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dipublikasikan oleh pihak tertentu, sehingga sumber data yang tidak langsung memberikan data pengumpul data. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja modal daerah Provinsi Jambi tahun 2019-2023 adalah sumber data yang akan diaplikasikan didalam penelitian ini. Penelitian ini, melakukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Data yang dihimpunkan peneliti berupa dokumen keuangan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (LRAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2019-2023. Data tersebut didapatkan melalui situs direktorat jenderal perimbangan keuangan (<https://dpjk.kemenkeu.go.id>) dan laporan kinerja pemerintah Provinsi Jambi tahun 2019-2023 yang dipublikasikan.

4. HASIL

Pada bagian ini peneliti memaparkan penjelasan berkenaan hasil penelitian akan dimulai dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang berhubungan dengan data penelitian berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dimana hasil pengujian pembahasan dilakukan melalui variabel independen yaitu rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi serta variabel dependen yaitu pada kinerja keuangan daerah Provinsi Jambi.

4.1. Kinerja Keuangan Daerah

4.1.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 5
Rasio Kemandirian APBD
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian	Kriteria
2019	Rp1.651.090.000	Rp2.922.490.000	56,49	Sedang
2020	Rp1.535.180.000	Rp2.862.890.000	53,62	Sedang
2021	Rp1.843.430.000	Rp2.879.980.000	64	Sedang
2022	Rp2.163.590.000	Rp2.527.280.000	85,60	Tinggi
2023	Rp1.900.660.000	Rp2.384.680.000	79,70	Tinggi
Mean			67,88	

Sumber : Data Olahan, 2024

Rata-rata rasio kemandirian Pemerintah Daerah Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran ialah sebesar 67,88 %. Menurut hasil persentase berdasarkan pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah, tingkat kemandirian Pemerintah Provinsi Jambi tergolong sedang atau dapat dikatakan persentase PAD terhadap dana perimbangan masuk pada kriteria tinggi. Hal ini bisa dirangkum bahwa pemerintah daerah Provinsi Jambi telah secara ideal mengeksplorasi potensi penerimaan daerahnya.

4.1.2. Rasio Efektivitas PAD

Tabel 6
Rasio Efektivitas APBD
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

Tahun	PAD Realisasi	PAD Anggaran	Rasio Efektivitas	Kriteria
2019	Rp1.651.090.000	Rp1.524.640.000	108,29	Efektif
2020	Rp1.535.180.000	Rp1.665.330.000	92,18	Tidak Efektif
2021	Rp1.843.430.000	Rp1.507.200.000	122,30	Efektif
2022	Rp2.163.590.000	Rp1.780.660.000	121,50	Efektif
2023	Rp1.900.660.000	Rp2.259.690.000	84,11	Tidak Efektif
Mean			105,68	

Sumber : Data Olahan, 2024

Rata-rata rasio efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran ialah sebesar 105,68 %. Menurut rasio efektivitas, tingkatan efektivitas Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya menunaikan urusan pemerintah bisa dibilang efektif. Situasi ini juga menunjukkan peningkatan kemampuan daerah yang kian membaik, meskipun harus lebih konsisten lagi dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Namun sebaliknya pada tahun 2020 dan 2023 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tidak efektif dalam mengelola target PAD yang hendak dicapai.

4.1.3 Rasio Efisiensi PAD

Tabel 7
Rasio Efisiensi APBD
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

Tahun	Belanja Daerah Realisasi	Pendapatan Daerah Realisasi	Rasio Efektivitas	Kriteria
2019	Rp4.824.370.000	Rp4.575.190.000	105,44	Tidak efisien
2020	Rp4.430.390.000	Rp4.400.620.000	100,0	Efisien berimbang
2021	Rp4.388.300.000	Rp4.725.720.000	92,85	Efisien
2022	Rp4.755.420.000	Rp4.705.590.000	101,0	Tidak efisien
2023	Rp4.962.920.000	Rp4.305.980.000	115,25	Tidak efisien
Mean			103,05	

Sumber : Data Olahan, 2024

Rata-rata rasio efisiensi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran ialah sebesar 103,05 %. Menurut hasil persentase berdasarkan pola hubungan dan tingkat efisiensi daerah, tingkat efisiensi Pemerintah Provinsi Jambi tergolong tidak efisien atau dapat dikatakan persentase Pendapatan Daerah terhadap belanja daerah relatif tidak seimbang atau efisien. Hal ini dapat dilihat pada table 4.3 hanya pada tahun 2021 terjadi efisiensi terhadap anggaran untuk tujuan target program. Hal ini menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jambi menggunakan banyak dana bahkan lebih banyak lagi untuk belanja daerah, yang menyiratkan bahwa dana tersebut tidak mengamalkan manfaat yang relevan bagi masyarakat.

5. PEMBAHASAN

5.1. Kinerja Keuangan Daerah

5.1.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan otonomi daerahnya pada periode tahun 2019-2023 menunjukkan adanya posisi menanjak dari awalnya kemandirian berkriteria sedang ke kriteria tinggi. Pada tahun 2019 Rasio Kemandirian senilai 56,49 %, dilanjutkan pada tahun 2020 sebesar 53,62 %, kemudian pada tahun 2021 nilai yang diperoleh kemandiriannya yaitu sebesar 64%. Selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2019-2021 pola hubungan kemandiriannya dikatakan sedang pada kriterianya. Sedangkan pada tahun 2022 mencapai persentase 85 % dan pada tahun 2023 yaitu 79,70%. Sehingga pada tahun 2022 dan 2023 kriteria yang didapatkan untuk kemandirian yaitu tinggi. Hal ini terjadi dari dampak virus corona dan pajak yang

didapatkan oleh masyarakat yang taat terhadap pajak serta eksploitasi sumber daya alam yang belum memadai tetapi terus dikembangkan tiap tahun-tahun setelahnya agar Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tidak bergantung dana ke pusat maupun pinjaman lainnya.

5.1.2. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah, pemerintah daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan otonomi daerahnya pada periode tahun 2019-2023 menunjukkan adanya fluktuasi/naik turunnya pada rasio efektivitas setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada table 4.2 dimana pada tahun 2019 rasio efektivitas yang didapatkan yaitu 108,29% yang berarti efektif. Sedangkan pada tahun 2020 didapatkan rasio efektivitas senilai 92,18 % yang berarti tidak efektif. Akan tetapi pada 2 tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2021 dan 2022 terjadi efektif pada nilai yang didapatkan yaitu senilai 122,30 % dan 121,50%. Hingga pada akhirnya pada tahun 2023 mengalami penurunan senilai 84,11 % yang menandakan bahwa rasio efektivitas yang didapatkan tidak efektif.

Dengan ini maka mengilustrasikan bahwa tingkat kemampuan daerah mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir, bercampur antara efektif dengan tidak efektif. Hanya pada tahun 2020 dan 2023 yang mengalami ketidak efektifan sedangkan pada tahun 2019,2021, dan 2022 mengalami efektif. Sehingga dalam menjalankan urusan pemerintah daerah Provinsi Jambi bercampur dari tahun ketahun untuk menyalurkan pendapatan daerahnya dengan menggambarkan kinerja Pemerintah daerah Provinsi Jambi yang naik turun tidakbisa seimbang untuk 5 tahun berjalan.

Posisi menanjak dari awalya kemandirian berkriteria sedang ke kriteria tinggi. Pada tahun 2019 Rasio Kemandirian senilai 56,49 %, dilanjutkan pada tahun 2020 sebesar 53,62 %, kemudian pada tahun 2021 nilai yang diperoleh kemandiriannya yaitu sebesar 64%. Selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2019-2021 pola hubungan kemandiriannya dikatakan sedang pada kriterianya. Sedangkan pada tahun 2022 mencapai persentase 85 % dan pada tahun 2023 yaitu 79,70%. Sehingga pada tahun 2022 dan 2023 kriteria yang didapatkan untuk kemandirian yaitu tinggi. Hal ini terjadi dari dampak virus corona, pembagunan berkelanjutan dari program sebelumnya dan pajak yang didapatkan oleh masyarakat yang taat terhadap pajak serta eksploitasi sumber daya alam yang belum memadai tetapi terus dikembangkan tiap tahun-tahun setelahnya agar Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tidak bergantung dana ke pusat maupun pinjaman lainnya.

5.1.3. Rasio Efisiensi PAD

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah, pemerintah daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan otonomi daerahnya pada periode tahun 2019-2023 menunjukkan adanya posisi fluktuasi/naik turun nilainya menyatu antara tidak efisien, efisien berimbang dan efisien. Hal ini dapat dilihat pada table 4.3 yang menyatakan. Pada tahun 2019 Rasio efisiensi senilai 105,44 %, yang bermakna tidak efisien. dilanjutkan pada tahun 2020 sebesar 100,0%, yang berarti efisien berimbang. Kemudian pada tahun 2021 nilai yang diperoleh efisiensinya yaitu sebesar 92,85%. Yang menunjukkan bahwa efisien. Sedangkan pada 2 tahun berikutnya yaitu pada tahun 2022 dan 2023 bermakna tidak efisien disebabkan rasio efisiensi yang didapatkan bernilai 101,0 % dan 115,25 %. Disimpulkan hanya pada tahun 2021 terjadi efisiensi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Selebihnya tidak didapatkan. Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah harus lebih efisien lagi dalam menggunakan dana untuk Provinsi Jambi kedepannya baik itu program-program kecil atau bersinambungan maupun tidak.

6. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Tingkat kemandirian Provinsi Jambi pada kinerja keuangan daerah dari analisis kinerja keuangan daerah pada periode 2019-2023 ditinjau pada rasio kemandirian berada dalam angka 67,88 %. Sehingga dikategorikan sedang,
- 2) Tingkat efektivitas Provinsi Jambi pada kinerja keuangan daerah dari rasio efektivitas PAD berada pada 105,68 % sehingga dapat dikategorikan efektif.
- 3) Tingkat efisiensi Provinsi Jambi pada kinerja keuangan daerah dari rasio efisiensi berada dipersentase 103,05 % yang berarti tidak efisien.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu:

1. Studi hanya pada Provinsi Jambi untuk mewakili semua Kabupaten/Kota yang ada di Daerah Provinsi Jambi pada rentang tahun 2019-2023. Hanya mengambil 5 tahun terakhir saja.

2. Variabel dalam penelitian ini hanya sebatas rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi. hal ini mengakibatkan sedikit peluang untuk variabel independen dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan derajat desentralisasi, rasio belanja langsung dan tidak langsung serta rasio pertumbuhan tidak tercantum dalam penelitian ini.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti menganjurkan beberapa saran, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasinya dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah di Provinsi Jambi agar dapat lebih meningkatkan kinerja daerahnya.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk Penelitian Selanjutnya diharapkan agar dapat memuat seluruh analisis rasio dalam pengukuran kinerja keuangan daerah, disarankan untuk menggunakan periode waktu yang lebih panjang tahun yang akan diteliti dan pertahun dianalisis secara sendiri-sendiri tanpa digabungkan menjadi satu kesatuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hardani, Auliya, N. hikmatul, Andriani, H., Fardani, Roushandy Asri Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif* (H. Abdi (ed.); 1 ed.). CV. Pustaka Ilmu. <https://www.pustakailmu.co.id>
- Liow, M. S. D., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pada Kota-Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(3), 14–25. <https://doi.org/10.35794/jpekd.32795.20.3.2019>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Universitas Terbuka.